ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH : STUDI KASUS DI KABUPATEN PELALAWAN PERIODE 2019 - 2023

(ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE : CASE STUDY IN PELALAWAN REGENCY FOR THE PERIOD 2019 – 2023)

SKRIPSI

OLEH :

E L F I T R I A
NIM: 2362201108

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2025

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH : STUDI KASUS DI KABUPATEN PELALAWAN PERIODE 2019 - 2023

SKRIPSI

Diajukan Seabagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian *Oral Comprehensive* Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning

OLEH :

E L F I T R I A
NIM: 2362201108

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2025

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ELFITRIA

NIM : 2362201108

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN : AKUNTANSI

JUDUL : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH : STUDI KASUS DI KABUPATEN PELALAWAN PERIODE 2019 -2023

DISETUJUI:

PEMBIMBING I

ARINI, S.E., M.Ak., Ak., CA., CGAA
NIDN.1001019105

PEMBIMBING II

ZAHARMAN, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN.1013086801

DEKAN

Dr. DINI ONASIS, S.E., S.H., M.M., M.H AK., CA. ACPA
NIDN.1006067101

KETUA PRODI

Dr. NENENG SALMIAH, SE.,MM., Ak, CA.
NIDN.1012096801

Dipindai dengan CamScanner

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ELFITRIA

NIM : 2362201108

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN : AKUNTANSI

JUDUL : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH : STUDI KASUS DI KABUPATEN PELALAWAN PERIODE 2019-2023

DISETUJUI:

KETUA PRODI

Dr. NENENG SALMIAH, SE.,MM., Ak, CA.
NIDN.1012096801

SEKRETARIS PRODI

SERLY NOVIANTI, SE.,M.Ak
NIDN.1007118903

ANGGOTA

ARINI, S.E., M.Ak., Ak., CA., CGAA
NIDN.1001019105

ZAHARMAN, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN.1013086801

ALJUFRI, S.E, M.Ak., Ak., CA
NIDN.1002027001

FAIZAH KAMILAH, SE.,M.Ak., Ak
NIDN.1012088901

Dipindai dengan CamScanner

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH : STUDI KASUS DI KABUPATEN PELALAWAN PERIODE 2019 - 2023

ELFITRIA
2362201108

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah : studi kasus di Kabupaten Pelalawan periode 2019 – 2023 di lihat dari : (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio Efektivitas PAD, (3) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (4) Rasio Efesiensi Keuangan Daerah, dan (5) Rasio Keserasian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan. Pengumpulan data mengunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif menggunakan: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efesiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. Hasil Analisis menunjukan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dilihat dari dari : (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya masih tergantung dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 14,73% (2) Rasio Efektifitas PAD dapat dikategorikan tidak efektif karena karna rata-ratanya sebesar 83,55% (3) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan kurang karena rata-ratanya sebesar 12,51% (4) Rasio Efesiensi Keuangan Daerah dapat dikategorikan tidak efesien karena karna rata-ratanya sebesar 103,48%, dan (5) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 70,34% dibanding dengan rata-rata belanja modal sebesar 17,62% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Kata Kunci : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efesiensi Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian.

ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE: A CASE STUDY IN PELALAWAN REGENCY FOR THE PERIOD 2019 – 2023

ELFITRIA
2362201108

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the financial performance of the local government through a case study in Pelalawan Regency for the period 2019–2023, viewed from: (1) Regional Financial Independence Ratio, (2) Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio, (3) Fiscal Decentralization Degree Ratio, (4) Regional Financial Efficiency Ratio, and (5) Harmony Ratio. This research is a descriptive quantitative study conducted in Pelalawan Regency. Data were collected using documentation methods. The data analysis technique used is descriptive quantitative analysis through the five ratios mentioned. The results show that the financial performance of the Pelalawan Regency Government, based on: (1) The Regional Financial Independence Ratio, is still classified as very low, with a dependency pattern categorized as instructive, with an average ratio of 14.73%; (2) The PAD Effectiveness Ratio is categorized as ineffective, with an average of 83.55%; (3) The Fiscal Decentralization Degree Ratio is considered low, with an average of 12.51%; (4) The Regional Financial Efficiency Ratio is categorized as inefficient, with an average of 103.48%; and (5) The Harmony Ratio indicates that the average operational expenditure is still very high at 70.34%, compared to the average capital expenditure of only 17.62%, indicating that the Pelalawan Regency Government has not given sufficient attention to regional development.

Keywords : ***Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Fiscal Decentralization Degree Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Harmony Ratio.***

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis dalam bentuk skripsi ini adalah asli dan belum pernah digunakan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana,Megister,dan atau Doktor) baik di Universitas Lancang Kuning maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karyatulis ini, serta lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 31 Januari 2025
Yang membuat pernyataan,

Elfitria

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirobbil'alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **" *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Kasus Di Kabupaten Pelalawan Periode 2019 – 2023.*"**

Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat berguna baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan serta dukungan, baik secara moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Dini Onasis, S.E., MM. Ak., CA. dan Wakil Dekan Bapak Aljufri., S.E., M. AK., CA.
2. Ketua Jurusan Akuntansi Ibu Neneng Salmiah., S.E., M.M., Ak CA dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Ibu Serly Novianti,S.E.,M.Ak.beserta seluruh stafnya.

3. Ibu Arini, S.E., M.Ak., Ak., CA., CGAA Selaku Pembimbing I dan Bapak Zaharman, S.E., M.Si., Ak, CA. Selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Bapak dan Ibu dosen selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT.
5. Teristimewa terimakasih banyak untuk kedua orang tua penulis, terima kasih atas segala do'a, kasih sayang, dukungan, semangat dan bantuan moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis.
6. Teristimewa terimakasih banyak untuk suami dan anak-anak atas segala do'a, kasih sayang, dukungan, semangat dan bantuan moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis.
7. Buat Sahabatku dan teman dekatku serta teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan rekan-rekan di Kampus Lancang Kuning yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, waktu, kesabaran dari awal perkuliahan hingga akhir dari proses pembuatan skripsi ini.Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun para pembaca.

Pekanbaru, 31 Januari 2025
Penulis

Elfitria

DAFTAR ISI

ABSTRAK

PERNYATAAN

I. KATAPENGANTAR……..…i

II. DAFTAR ISI…….…..….……..iii

III. DAFTAR TABEL…….…….…..….…..v

IV. DAFTAR GAMBAR…….…..….....vi

BAB I PENDAHULUAN…….…..……1

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN…..... 1

1.2. RUMUSAN MASALAH…….…...7

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN…… ….. ..8

1.3.1 Tujuan Penelitian…… …...8

1.3.2 Manfaat Penelitian…….…….... 8

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN…….....….…....9

BAB II TELAAH PUSTAKA 11

2.1. TELAAH PUSTAKA 11

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ..... ……11

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....……12

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....….....…..…12

2.1.4 Analisis Laporan Keuangan.....16

2.1.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....17

2.1.4.2 Rasio Efektivitas PAD 20

2.1.4.3 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 21

2.1.4.4 Rasio Efesiensi Keuangan Daerah.....23

2.1.4.5 Rasio Keserasian 24

2.1.5. Penelitian Terdahulu 25

2.2. KERANGKA PEMIKIRAN 28

BAB III METODE PENELITIAN.....32

3.1. OBJEK PENELITIAN.....32

3.1.1. Lokasi Penelitian 32

3.1.2. Desaian Penelitian 32
3.1.3. Subjek dan Objek Penelitian 32
3.1.4. Definisi Operasional Variabel 33
3.1.5. Teknik Pengumpulan Data 34
3.1.6. Teknik Analisis 34
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 40
4.1 GAMBARAN UMUM 40
4.1.1. Gambaran Geografis..... 40
4.1.2. Pemerintahan Struktur Organisasi..……...……. 40
4.1.3. Struktur Organisasi 43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 44
5.1 DATA UMUM 45
5.2 DATA KHUSUS 45
5.2.1. APBD 2019 - 2023.....45
5.2.2. REALISASI APBD 2019 - 2023 47
5.2.3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **..... 49**
5.2.3.1. HASIL PENELITIAN ……...…. ……..… 49
5.2.3.2. PEMBAHASAN……..…….……. 59
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 69
6.1 KESIMPULAN 69
6.2 SARAN 71
DAFTAR PUSTAKA……..... 73
***LAMPIRAN – LAMPIRAN*……..…….. 75**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019-2013……..…….5

Tabel 2.1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah……..……....19

Tabel 2.2. Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal……..……....22

Tabel 2.3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan……..……...…..…….....24

Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu……..……...……...25

Tabel 3.1. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan……..…….…….....37

Tabel 4.1. Luas wilayah Kecamatan Kabupaten Pelalawan……..…….....40

Tabel 5.1. APBD Kabupaten Pelalawan Tahun 2019-2023……..…….....44

Tabel 5.2. Realisasi APBD Kabupaten Pelalawan Tahun 2019-2023……..……..45

Tabel 5.3. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....……50

Tabel 5.4. Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah…….……..……51

Tabel 5.5. Penghitungan Rasio Efektivitas PAD ……..……...52

Tabel 5.6. Tingkat Rasio Efektifitas PAD ……..…….....53

Tabel 5.7. Penghitungan Rasio DDF ……..…….…….……....54

Tabel 5.8. Tingkat Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal….…….....55

Tabel 5.9. Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ...……..…….….56

Tabel 5.10. Tingkat Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ...…..…… ….....57

Tabel 5.11. Penghitungan Rasio Keserasian (belanja Operasional….……....58

Tabel 5.12. Tingkat Rasio Keserasian (belanja modal).....……..…....59

DAFTAR GAMBAR

Gambar.2.1 Kerangka Pemikiran……..……. 32

Gambar 3.1 Struktur BPKAD Kabupaten Pelalawan**……..** 43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan cerminan dari kemampuan pemda dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam laporan kali ini, kami akan mengulas kinerja keuangan pemda selama tahun anggaran yang lalu, dengan fokus pada pendapatan, belanja, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Kinerja keuangan pemerintah daerah tentunya melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran setiap tahun sesuai dengan realisasi anggaran sebagai transparansi kepada publik.

Sektor publik merupakan bagian dari dan berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah dan berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber pendanaan sektor publik berasal dari masyarakat, seperti retribusi daerah dan pajak. Keuangan daerah tidak terlepas dari tata cara pengelolaan yang dipisahkan dan dimiliki oleh daerah dan pendapatan lain-lain yang sah dan terikat pada undang-undang yang berlaku (Horota et al., 2017). Desentralisasi daerah mewujudkan sebuah pelaksanaan kebebasan bagi daerah atau otonomi daerah, sehingga tugas dan wewenang kepala daerah untuk mengurus dan mengatur roda pemerintahan di tingkat daerah harus melihat pada potensi yang dimiliki daerah dan seluruh kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Dimana Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan terhadap keuangan daerah hingga

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam kegiatan otonomi daerah dan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pada daerah dimulai dari awal perencanaan hingga pengawasan keuangan daerah tersebut. Peningkatan kinerja dikatakan berhasil apabila selaras dengan peraturan pemerintah (Setianingrum dan Haryanto, 2020). Sistem desentralisasi fiskal atau otonomi daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat yang dijadikan proses pemulihan dan evaluasi kinerja dengan membuat sebuah perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya, serta menjadi tolak ukur dari periode ke periode untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kinerjanya (Rahmayati, 2016).

Sebagai bagian dari kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan umum, kinerja keuangan daerah sebagai roda pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib dituangkan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban sebagai evaluasi. Pemerintah daerah menyampaikannya kepada masyarakat sebagai pelaksanaan keterbukaan informasi dan keefektifan anggaran yang digunakannya dengan baik. Berbagai bentuk penyelewengan anggaran ada pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sehingga hal itu membuat konsentrasi masyarakat fokus pada kinerja pemerintah Kabupaten Pelalawan. Masa

kekuasaan pemerintahan yang sebelumnya telah membuat masyarakat marah dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Pelalawan. Pembangunan pemerintahan mempunyai dua bagian utama, yaitu sebagai subyek sekaligus obyek agar pemerintah daerah menerapkan transparansi anggaran dan meningkatkan efektivitas anggaran (Christia dan Ispriyarso, 2019).

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan merupakan tolak ukur pengelolaan atas Desentralisasi fiskal dimulai pada tahun 2001 yang ditandai berlakunya sistem desentralisasi fiskal atau otonomi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat.Kondisi tersebut dijadikan sebagai proses pemulihan dan evaluasi kinerja dengan membuat sebuah perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya, serta menjadi tolak ukur dari periode ke periode untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kinerja. Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila memiliki penilaian kemandirian kinerja keuangannya baik, efektif, pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terus meningkat, dan proporsi antara belanja modal dan belanja operasional yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan kinerja keuangannya agar sumber daya yang dimiliki daerah

dapat di optimalkan.penelitian ini menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio keserasian dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2019-2023.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memperkuat dan memperbarui pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan SAL, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh pemerintah daerah (pemda) merupakan laporan terstruktur yang menggambarkan posisi keuangan serta transaksi-transaksi keuangan dan nonkeuangan yang dilakukan setiap tahun. Laporan keuangan tersebut disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih , arus kas , hasil operasi , dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (PSAP 01 Par: 9).

Menurut (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu

memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja merupakan sebuah pencapaian dari apa yang telah direncanakan oleh organisasi. Jika pencapaian sesuai dengan yang telah direncanakan, maka kinerja dari organisasi dapat dikatakan baik. Sebaliknya, jika pencapaian melebihi dari yang telah direncanakan dapat dikatakan kinerja organisasi tersebut sangat baik. Namun, apabila perencanaan tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka kinerjanya dapat dikatakan buruk. Kinerja keuangan merupakan suatu alat ukur yang menggunakan indikator keuangan.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan, menunjukkan bahwa persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019-2023.

Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019-2013

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Persentase
2019	Rp.155.158.906.702,15	Rp.155.693.478.613,31	100,35 %.
2020	Rp.148.682.087.597,96	Rp.145.390.617.242,78	97,79 %.
2021	Rp.196.779.941.464,00	Rp.159.142.130.790,35	80,87 %.
2022	Rp.248.871.591.795,00	Rp.191.920.502.909,37	77,12 %.
2023	Rp.301.457.515.202,00	Rp.185.762.566.837,41	61,62 %.

Pada tahun 2019, realisasi PAD nya sebesar Rp.155.693.478.613,31 dari Anggaran PAD Rp.155.158.906.702,15 atau sebesar 100,35 %. Pada tahun 2020, realisasi PAD nya sebesar Rp. Rp.145.390.617.242,78 dari Anggaran PAD Rp.148.682.087.597,96 atau sebesar 97,79 %. .Pada tahun 2021, realisasi PAD nya sebesar Rp.159.142.130.790,35 dari Anggaran PAD Rp.196.779.941.464,00 atau sebesar 80,87 %. Pada tahun 2022, realisasi PAD sebesar Rp.191.920.502.909,37 dari Anggaran PAD Rp.248.871.591.795,00 atau sebesar 77,12%. Sedangkan pada tahun 2023, realisasi PAD sebesar Rp.185.762.566.837,41 dari Anggaran PAD Rp.301.457.515.202,00 atau sebesar 61,62%. Sehingga dapat dijelaskan bahwa, tren realisasi PAD Kabupaten Pelalawan mulai tahun 2019-2023 dapat dikatakan menurun. Menurut (Badriyah, 2021), Rasio Efektifitas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah sesuai yang ditetapkan.Dapat disimpulkan bahwa persentase rata-rata realisasi PAD Kabupaten Pelalawan kurang dari 100%, maka dikatakan tidak efektif.

Berdasarkan fenomena dan uraian tersebut, rendahnya kemampuan keuangan daerah yang dilihat dari tingginya angka pendapatan transfer pada Kabupaten Pelalawan. Penurunan tingkat efektifitas Kabupaten Pelalawan dapat dilihat dari perbandingan realisasi PAD terhadap target PAD, sehingga terjadi penurunan yang tercermin dari laporan realisasi anggaran Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019-2023 dan tingginya angka belanja operasional dibandingkan belanja modal. Dari kondisi tersebut, penelitian ini

memberikan perhatian khusus agar menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Adanya ekspektasi pada angka realisasi PAD yang tidak sesuai dan sangat jauh dari target PAD yang ditetapkan menjadi dasar pentingnya penelitian ini.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan fenomena diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk menganilisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus di Kabupaten Pelalawan) periode 2019-2023.

1. Bagaimana kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Pelalawan selama periode 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ?
2. Bagaimana kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Pelalawan selama periode 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?
3. Bagaimana kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Pelalawan selama periode 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ?
4. Bagaimana kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Pelalawan selama periode 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
5. Bagaimana kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Pelalawan selama periode 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Keserasian ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan BPKAD Kabupaten Pelalawan selama periode 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ?
2. Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan BPKAD Kabupaten Pelalawan selama periode 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?
3. Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan BPKAD Kabupaten Pelalawan selama periode 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ?
4. Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan BPKAD Kabupaten Pelalawan selama periode 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
5. Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan BPKAD Kabupaten selama periode 2019-2023 Pelalawan jika dilihat dari Rasio Keserasian ?

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat menjadi masukkan yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari bangku kuliah, serta memperluas wawasan peneliti dalam bidang Analisis Keuangan khususnya Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan penerapan teori Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, , Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan

   Bagi pemerintah pusat dan daerah, untuk memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya/potensi daerah. Penelitian ini dapat mengetahui hasil kinerja dari pemerintah berdasarkan perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk kinerja satuan kinerja perangkat daerah di pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan agar meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa yang akan datang

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar pembahasan dalam tugas akhir ini dibagi dalam lima bab, yang dibagi ke dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang *review* penelitian terdahulu , landasan teori yang behubungan dengan permasalahan yang di ambil oleh penulis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta analisis data terkait penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi informasi gambaran umum objek penelitian seperti struktur BPKAD kabupaten pelalawan, letak geografis dan visi misi kabupaten pelalawan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian penulisan dalam penelitian, yang memuat kesimpulan atas hasil penelitian serta saran saran untuk perbaikan penelitian di masa yang akan datang untuk judul penelitian yang sama.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan untuk Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2019 sampai dengan 2023 rasionya masing-masing sebesar : 11,29%, 11,95%, 14,75%; , 17,36%; dan 18,27%. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2019 berjalan efektif , tapi pada tahun 2020 sampai tahun 2023 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih di bawah 100% yaitu sebesar 97,79%, 80,87% dan 77,12% dan 61,62%.

Sedangkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan rendah , karena masih berada dalam skala interval 10,01%-20,00%. Berturut-turut dari tahun 2019 sampai dengan 2023 rasionya masing-masing sebesar : 9,78%, 10,22%, 12,33%; 14,79% dan 15,45%. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikategorikan Tidak Efisien , karena masih berada dalam skala interval diatas 100,%. Pada tahun 2019 cukup Efisien karna 89,38% namun pada tahun 2020 sampai tahun 2023

rasionya masing-masing sebesar : 112,13%, 102,83%, 106,78%; dan 106,30%. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten jika dilihat dari Rasio Keserasian adalah belum stabil dari tahun ke tahun , karena pengeluaran belanja operasi lebih besar dari pada belanja modal. Besar belanja operasi berada pada kisaran 69,94%, 66,43%, 69,31% ,73,43% an 72,73% dari tahun 2019 sampai tahun 2023 sedangkan belanja modal sebesar : 16,82%, 20,55% , 18,92%, 15,12%; dan 16,70% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Berdasarkan tiga rasio tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi keagenan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan belum berjalan secara optimal selama periode 2019–2023. Efektivitas PAD yang rendah, efisiensi anggaran yang buruk, dan proporsi belanja modal yang minim menjadi indikator bahwa pemerintah belum mampu menjalankan mandat masyarakat secara akuntabel dan bertanggung jawab sesuai prinsip Agency Theory. Diperlukan penguatan akuntabilitas fiskal, perbaikan tata kelola anggaran, serta peningkatan komitmen pembangunan untuk memperbaiki hubungan keagenan antara pemerintah dan masyarakat.

Ketiga rasio tersebut secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Pelalawan masih lemah selama periode 2019–2023. Rendahnya kemandirian keuangan, minimnya kontribusi PAD, serta dominasi belanja operasional menjadi bukti bahwa daerah masih sangat tergantung pada pusat, dan belum menggunakan kewenangan fiskalnya secara maksimal untuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu,

diperlukan strategi peningkatan PAD, efisiensi belanja, dan prioritas pembangunan agar tujuan desentralisasi fiskal benar-benar tercapai.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD bias dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis , berkala dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparatur daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif- alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

   Agar pelaksanaan agency theory dan desentralisasi fiskal benar-benar tercermin dalam praktik keuangan daerah**,** Pemerintah Kabupaten Pelalawan perlu memperkuat basis pendapatan lokal (PAD), Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran,

Menyusun kebijakan belanja yang pro-pembangunan dan berpihak pada masyarakat.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat dari pada penelitian oleh penulis ini. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada kabupaten Pelalawan. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2012). ***Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat**.

Abdul Halim. (2012). ***Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN**.

Amin, M. (2015). ***Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers**.

Arini, D., & Rekan-rekan. (2023). ***Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada Kinerja Keuangan Daerah*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung**.

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). ***Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia***. Law Reform, 15(1), 149–163. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360

Drastiana. (2021). ***Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah***. Yogyakarta: Deepublish.

Ekaputri, R. S., & Munandar, A. (2021). **Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Malang tahun anggaran 2016–2020**. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 1–12. https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1684

Erma Julaida Harahap. (2021). "**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara**." *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara .

Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M. (2017). ***Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura***. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEUDA), 2(1). https://doi.org/10.52062/keuda.v2i1.716

Hendro Sumarjo. (2010). "**Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**." *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Heri Faisal Harahap (2020). **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah** .

Mahmudi. (2019). ***Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.**

Manurung, A., Siregar, B., & Simanjuntak, C. (2024). ***Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara Periode 2019–2022*. Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara Press.**

Mardiasmo. (2018). ***Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi**.

Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). "**Fiscal Decentralization and Economic Growth**." *World Development*, 31, 1597–1616

Mohammad Mahsun.(2019).***Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.**

Rahmayati. (2016). ***Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011–2013***. Jurnal Soedarsa

Setianingrum, R., & Haryanto, H. (2020). **Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah**. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/27592

Smith, J., & Desilasari, R. (2015). ***Pengelolaan Keuangan Publik di Era Desentralisasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat**.

Widodo. (2020). ***Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.**

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 **tentang Pembentukan Kabupaten.**

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 **tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 **tentang Keuangan Negara.**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 **tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 **tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.**